

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan dan jasa berbasis aplikasi, termasuk layanan pesan antar makanan. Kemudahan tersebut di sisi lain memunculkan persoalan hukum baru, yakni wanprestasi oleh konsumen dalam bentuk pemesanan tidak nyata yang merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu contohnya terjadi pada layanan ShopeeFood di Kota Medan, di mana pemesan menggunakan metode pembayaran di tempat, namun tidak menerima pesanan atau tidak dapat dihubungi saat proses pengantaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan pemesan dalam pemesanan tidak nyata dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik. Kondisi tersebut memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan, antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, lemahnya pengawasan dari pihak platform, serta belum efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat. Di samping itu, peran penyelenggara sistem elektronik belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang memadai, sehingga pelaku usaha masih berada pada posisi yang dirugikan. Sehingga perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap wanprestasi dalam pemesanan tidak nyata pada layanan ShopeeFood di Kota Medan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan tanggung jawab platform digital, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Wanprestasi, Transaksi Fiktif dan ShoopeeFood

ABSTRACT

Advances in digital technology have transformed the way society engages in economic activities, particularly in app-based commerce and services, including food delivery services. While these conveniences have brought many benefits, they have also given rise to new legal issues, namely consumer default in the form of fraudulent transactions that cause financial losses to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). One such example occurred with the ShopeeFood service in Medan, where a customer used cash-on-delivery but either did not receive the order or could not be contacted during the delivery process, resulting in financial losses for the business. This study employs a normative-empirical legal methodology with legislative and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The legal materials used include primary sources such as the Civil Code and the Consumer Protection Act, supported by relevant secondary literature. The results of the discussion indicate that the customer's actions in fictitious transactions can be categorized as breach of contract because they fail to fulfill the obligations agreed upon in the electronic agreement. These circumstances entitle business operators to seek compensation. However, in practice, there are various obstacles, including difficulties in identifying the perpetrators, weak oversight by the platform, and the lack of effective mechanisms for simple and swift dispute resolution. Furthermore, the role of electronic system operators has not yet fully provided adequate protection, leaving business operators at a disadvantage. Consequently, legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises against breach of contract in fictitious transactions on the ShopeeFood service in Medan has not been optimal. Therefore, regulatory strengthening, increased accountability of digital platforms, and the development of more effective dispute resolution mechanisms are necessary to ensure legal certainty and a sense of justice for business operators.

Keywords: Legal Protection, Micro, Small, and Medium Enterprises, Default, Fictitious Transactions, and ShopeeFood